

Hariyanto Usia

PNS Kabupaten Kepulauan Sula,
Maluku Utara
Email: arhy_usia@yahoo.com

Ulung Pribadi

Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Uni-
versitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: ulungpribadi@gmail.com

[http://dx.doi.org/10.18196/
igpp.2014.0022](http://dx.doi.org/10.18196/igpp.2014.0022)

Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan Di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula

ABSTRACT

Public participation inside government become universal disclosure that appear concurrent with present him governance concept in arrangement government. After become mainstreaming issue governance concept (tata-kelola government) produce various definition. Concept governance refer in institution, process and tradition that determine, how kekuasaan held, decision made, and voice denizen in hear. Kabupaten local government Sula Isles especially Kecamatan Sanana to realize government that participative feel shortcoming. Cultivation and government information giving to community valued still very minim. To the present time, development planning that participative to need community only claimed unilaterally by government Sula Regency especially Sanana subdistrict has been conducted for well, and accordance procedure that apply. This research use two approaches outright namely qualitative and quantitative approach. Location research in Sanana subdistrict Sula regency. Data collection conducted with three way, namely: interview, documentation and questionnaire. Data analysis unit in this research is government Sula Regency, citizen and stakeholder that engage in musrenbang Kecamatan Sanana 2011-2012. Sample withdrawal technique in this research is withdrawal sample non random (non probability sampling) namely Purposive Sampling. This result research show community participation level in Musrenbang Sanana subdistrict. In 2011 and 2012 included in informing category level (level participation where community heard and allowed contend, but they do not have ability to get guarantee that their view would be considered by holder decision.) That thing in pengaruhi oleh factor internal: age, sex, level of education and work eye points of view. While factor external: government and stakeholder own experience that is more compared by community.

Keywords: citizen participation, development planning, governance

ABSTRAK

Partisipasi publik dalam pemerintahan menjadi wacana universal yang muncul seiring dengan hadirnya konsep *governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setelah menjadi *mainstreaming issue* konsep *governance* (tata-kelola pemerintahan) menghasilkan beragam definisi. Konsep *governance* merujuk pada institusi, proses dan tradisi yang menentukan, bagaimana kekuasaan diselenggarakan, keputusan dibuat, dan suara warga di dengar. pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula khususnya Kecamatan Sanana untuk mewujudkan pemerintahan yang partisipatif terasa kurang memuaskan. Pembinaan dan pemberian informasi pemerintah kepada masyarakat dinilai masih sangat minim. Sampai dengan saat ini, perencanaan pembangunan yang partisipatif terhadap kebutuhan masyarakat hanya diklaim secara sepihak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula khususnya Kecamatan Sanana telah dilakukan secara baik, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan sekaligus yakni pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Lokasi penelitian di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu: wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Unit analisis data dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Masyarakat dan *stakeholder* yang terlibat dalam musrenbang

Kecamatan Sanana 2011-2012. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel non acak (*non probability sampling*) yaitu *Purposive Sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Sanana Pada Tahun 2011 dan 2012 termasuk dalam kategori tingkat *informing* (tingkat partisipasi dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan.) Hal tersebut di pengaruhi oleh factor internal: usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan cara pandang mata pekerjaan. Sedangkan factor eksternal: pemerintah dan stakeholder memiliki pengalaman yang lebih dibanding masyarakat.
Kata kunci: Partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan, governance

PENDAHULUAN

Partisipasi publik (*Public Participation*) dalam pemerintahan menjadi wacana universal yang muncul seiring dengan hadirnya konsep *governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setelah menjadi *mainstreaming issue* konsep *governance* (tata-kelola pemerintahan) menghasilkan beragam definisi. Cagin sebagaimana di kutip oleh Syahriani dan Syakrani (2009:121) mengemukakan konsep *governance* merujuk pada institusi, proses dan tradisi yang menentukan, bagaimana kekuasaan diselenggarakan, keputusan dibuat, dan suara warga di dengar. (*Governance refers to the institutions, processes & traditions which define how powers is exercised, how decision are made, and how citizens have their say*).

Upaya pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula khususnya Kecamatan Sanana untuk mewujudkan pemerintahan yang partisipatif terasa kurang memuaskan. Pembinaan dan pemberian informasi pemerintah kepada masyarakat dinilai masih sangat minim. Sampai dengan saat ini, perencanaan pembangunan yang partisipatif terhadap kebutuhan masyarakat hanya diklaim secara sepihak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula khususnya Kecamatan Sanana telah dilakukan secara baik, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, tanpa ada pengkajian secara ilmiah melalui penelitian sebelumnya. Dengan alasan sebagaimana dimaksud maka penting kiranya agar penelitian ini dilakukan guna mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula.

Dari uraian latar belakang singkat diatas dapat dirumuskan

masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Sanana tahun 2011-2012? Faktor apa sajakah yang mempengaruhi Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Sanana tahun 2011-2012?

685

KERANGKA TEORI

Semenjak diberlakukannya Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kajian tentang perencanaan pembangunan cukup meningkat dikalangan akademik. Topik ini mendapat perhatian yang serius bukan hanya karena telah diberikan ruang kepada daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan dengan sistem *bottom up planning* melalui musrenbang, melainkan juga banyaknya ketidakberesan dalam mengelola kesempatan yang diberikan tersebut. Dimana banyak proses musrenbang hanya dilakukan untuk memenuhi persyaratan atau kewajiban pemerintah daerah dihadapan undang-undang. Beberapa penelitian yang terkait dengan partisipasi masyarakat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Agus Harto Wibowo (2009), Analisis Perencanaan Partisipatif (Studi di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang) dari penelitian tersebut Agus Harto Wibowo menjelaskan bahwa Perencanaan partisipatif belum optimal dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang serta tidak terwakilinya seluruh *stakeholders* dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Pemalang. (Keterwakilan pelaku pembangunan yang tidak representatif). Adapun penelitian lain yang sejenis dilakukan oleh Suciati (2006) dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati, dari penelitian tersebut Suciati Berkesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana umum tata ruang Kota Pati, baru merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah karena tuntutan desentralisasi dalam otonomi daerah

yang menghendaki pemerintah berperan bersama-sama *stakeholder* lain dalam perencanaan pembangunan termasuk perencanaan tata ruang. Sedangkan tujuan pemberdayaan masyarakat yang ingin dicapai dengan partisipasi itu sendiri belum dapat tercapai. Perencanaan pembangunan oleh sebagian pihak memang terasa sangat tidak partisipatif keterlibatan masyarakat tidak dilihat sebagai sebuah substansi dari pada pembangunan itu sendiri melainkan hanya dijadikan sebagai objek.

Dalam pengertian pembangunan para ahli memberikan berbagai macam definisi tentang pembangunan, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Adapun Ginanjar Kartasasmita (1997:9) memberikan pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan yaitu: “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Meskipun pengertian pembangunan amat bervariasi namun menurut Esman (Tjokrowinoto 1999:91) secara umum pembangunan dapat diartikan sebagai proses perubahan dari kondisi nasional yang satu ke kondisi nasional yang dipandang lebih baik atau kemajuan yang terus menerus menuju perbaikan kehidupan manusia yang mapan. Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan tentang perencanaan pembangunan partisipatif dapat diartikan sebagai proses penyusunan rencana pembangunan yang dihasilkan melalui kemitraan seluruh aktor (*stakeholders*), dirumuskan melalui proses dialog dengan pengambilan keputusan dilakukan secara *bargaining*.

Partisipasi masyarakat dapat diartikan bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya. Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201-202). Menurut Slamet (1993:97,137-143), faktor-

faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan mata pencaharian. Faktor internal berasal dari individu itu sendiri. Secara teoritis, tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis, yaitu: Jenis Kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Sementara itu faktor-faktor eksternal dapat dikatakan sebagai petaruh (*stakeholder*), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program (Sunarti, 2003:79). Adapun faktor-faktor eksternal dalam Musyawarah rencana pembangunan ini adalah: Pemerintah, dan *stakeholder*.

Menurut Sherry Arnstein (1969) dalam Suciati (2006:50) terdapat 8 tangga tingkat partisipasi berdasarkan kadar kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan, yaitu: 1. *Manipulation* (manipulasi) 2. *Theraphy* (terapi/penyembuhan), 3. *Informing* (informasi), 4. *Consultation* (konsultasi), 5. *Placation* (penentraman/perujukan), 6. *Partnership* (kerjasama), 7. *Delegated Power* (pelimpahan kekuasaan), 8. *Citizen Control* (kontrol masyarakat).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan sekaligus yakni pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, Bogdan dan Taylor dalam (Maleong, 2010:4). Lokasi penelitian di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Kecamatan sanana merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Kepulauan Sula. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung di lokasi penelitian oleh sipeneliti (pewawancara), dengan yang diteliti (yang diwawanncai). Data sekunder yaitu data tambahan yang diperoleh peneliti dari sumber tertulis (Arsip,

688 Dokumen pribadi maupun resmi) ataupun data statistik dari instansi terkait yang hubungannya dengan fokus penelitian”. Data sekunder ini juga merupakan data pendukung dan data ini di peroleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti, Maleong (2005;175).

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu: wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Unit analisis data dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang terdiri dari BAPPEDA ditambah dengan Pemerintah Kecamatan Sanana, Masyarakat dan *stakeholder* yang terlibat dalam musrenbang Kecamatan Sanana 2011-2012. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel non acak (*non probability sampling*) yaitu *Purposive Sampling* atau sampling pertimbangan/sampling dengan maksud tertentu. Pertimbangan digunakannya *purposive sampling* ini didasarkan pada tujuan penelitian adalah untuk melakukan kajian/ evaluasi terhadap partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan kecamatan di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh masyarakat dalam lingkup Kecamatan Sanan, dan sampel yang diambil hanyalah orang-orang yang mengikuti kegiatan musrenbang sebanyak 50 orang pada tahun 2011, dan 50 orang pada tahun 2012.

Untuk mengetahui tingkat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, dari nilai-nilai yang diperoleh pada setiap pertanyaan, agar dapat dipakai sebagai data yang mudah dianalisis dan disimpulkan sesuai dengan masalah yang dikemukakan, maka penyebaran nilai-nilai tersebut perlu diringkas dalam suatu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah suatu penyajian dalam bentuk tabel yang berisi data yang telah digolong-golongkan ke dalam kelas-kelas menurut keurutan tingkatannya beserta jumlah individu yang termasuk dalam masing-masing kelas (Hadi, 2001:225).

Tingkat partisipasi masyarakat diukur dengan metode kuantitatif

melalui penjumlahan skor dari variabel. Berdasarkan jumlah skor dari semua variabel, dapat diketahui tingkat partisipasi masyarakat masuk dalam kategori tipologi Delapan Tangga Partisipasi Arnstein. Besarnya interval skor untuk menentukan kategori tingkat partisipasi masyarakat secara menyeluruh didasarkan pada skor kategori tingkat partisipasi individu dikalikan dengan jumlah sampel. Penjelasan secara rinci sebagai berikut:

Terdapat 4 kriteria pertanyaan dengan pilihan jawaban masing-masing pertanyaan ada 8 pilihan dengan skor masing-masing berkisar 1 sampai 8. Sehingga minimum skor yang diperoleh untuk setiap individu (4×1) adalah 4, maksimum skor yang diperoleh untuk setiap individu (4×8) adalah 32, Skor minimum akan diperoleh dari $55 \times 4 = 220$ (Jumlah sampel dikali skor terendah) dan skor maksimum akan diperoleh dari $55 \times 32 = 1760$ (Jumlah Sampel dikali Skor Tertinggi) Dengan diketahuinya skor minimum dan maksimum maka diketahui pula jarak intervalnya yaitu, $1760 - 220 / 8 = 192,5$ (Skore tertinggi dikurangi skor terendah) dibagi 8. Dengan demikian, jika menggunakan tipologi dari Arnstien dengan 8 indikator tingkat partisipasi maka interval tipologi Arnstein dapat diuraikan sebagai berikut: 1. *Citizen Control* (1567.6-1760). 2. *Delegated Power* (1376-1567.5). 3. *Partnership* (1182.6-1375). 4. *Placation* (991-1182.5). 5. *Consultation* (797.6-990). 6. *Informing* (606-797.5). 7. *Therapy* (412.6-605). 8. *Manipulation* (220-412.5). Hasil dari pengolahan data tingkat partisipasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi akan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang nantinya dapat dianalisis dengan secara sistematis. Untuk hubungan antar variabel akan dilakukan dengan korelasi murni dan tabulasi silang dengan memperhatikan besaran nilai *Chi Square* dan besarnya *Contingency Coefficient*.

PEMBAHASAN

Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrebang Kecamatan

690 Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2011-2012, akan diukur dengan Derajat keterlibatan masyarakat yang terdiri dari variabel-variabel tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan, keaktifan mengemukakan masukan/saran/usul, keterlibatan dalam menetapkan konsep rencana, dan keterlibatan memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana.

TABEL 1. TINGKAT KEHADIRAN DALAM RAPAT/PERTEMUAN PADA MUSRENBANG

No	Variabel	Skala Penilaian	N	%	Bobot	N x Bobot	Jumlah Variabel
1	Tingkat kehadiran dalam rapat dan pertemuan	Hadir Sebagai Pendengar	6	10,9	1	6,0	178
		Hadir memberikan masukan untuk pemerintah	3	5,5	2	6,0	
		Hadir memberikan masukan untuk masyarakat	30	54,5	3	90,0	
		Hadir dan melakukan dialog dengan pemerintah	9	16,4	4	36,0	
		Hadir memberikan beberapa pengaruh	3	5,5	5	15,0	
		Hadir membagi tanggung jawab perencanaan	3	5,5	6	18,0	
		Hadir diberi limpahan kewenangan keputusan	1	1,8	7	7,0	
		Hadir memiliki kekuasaan penuh	0	0,0	8	0,0	
			55				

Sumber: Hasil Analisis

ANALISIS TINGKAT KEHADIRAN DALAM RAPAT/ PERTEMUAN

Untuk mengukur tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan digunakan skala penilaian yang mengacu pada Tangga Partisipasi Masyarakat Sherry Arnstein yang terdiri dari 8 tangga, berturut-turut dari tangga 1 sampai dengan 8 sebagai berikut: (1) hadir hanya sebagai pendengar saja; (2) hadir dan memberikan masukan tetapi untuk kepentingan pemerintah; (3) hadir dan memberikan masukan untuk kepentingan masyarakat; (4) hadir dan melakukan dialog/ tanya jawab dengan pemerintah; (5) hadir dan memberikan beberapa

pengaruh pada apa yang direncanakan; (6) hadir dan membagi tanggung jawab perencanaan dengan pemerintah; (7) hadir dan diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana; (8) hadir dan memiliki kekuasaan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana. Tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan dapat dilihat dalam tabel 1.

TABEL 2. TINGKAT KEHADIRAN DALAM RAPAT/PERTEMUAN PADA MUSRENBANG KECAMATAN SANANA TAHUN 2012

No	Variabel	Skala Penilaian	N	%	Bobot	N x Bobot	Jumlah Variabel
1	Tingkat kehadiran dalam rapat dan pertemuan	Hadir Sebagai Pendengar	5	9,1	1	5	184
		Hadir memberikan masukan untuk pemerintah	3	5,5	2	6	
		Hadir memberikan masukan untuk masyarakat	29	52,7	3	87	
		Hadir dan melakukan dialog dengan pemerintah	10	18,2	4	40	
		Hadir memberikan beberapa pengaruh	4	7,3	5	20	
		Hadir membagi tanggung jawab perencanaan	2	3,6	6	12	
		Hadir diberi limpahan kewenangan keputusan	2	3,6	7	14	
		Hadir memiliki kekuasaan penuh	0	,0	8	0	
			55	100,0			

Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan tahun 2011 pada tabel 1, sebagian besar responden hadir untuk memberikan masukan demi kepentingan masyarakat yakni sebanyak 30 orang (54,5%). Lalu diikuti dengan responden yang hadir melakukan tanya jawab dengan pemerintah sebanyak 9 orang (16,4%), responden yang hadir hanya sebagai pendengar saja sebanyak 6 orang (10,9%), dan sebanyak 3 orang (5,5%) berturut-turut hadir dalam rapat/pertemuan memberikan masukan untuk pemerintah, memberikan beberapa pengaruh pada apa yang di rencanakan, dan hadir untuk membagi tanggungjawab perencanaan dengan

pemerintah. Ada responden yang hadir dengan presentase terkecil yakni 1 orang (1,8%) hadir dan diberikan limpahan kewenangan untuk membuat keputusan. Tidak ada responden yang hadir dan memiliki kekuasaan penuh untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi rencana.

Tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan pada tahun 2012 sesuai dengan tabel 2 diatas, sebagian besar responden hadir untuk memberikan masukan demi kepentingan masyarakat yakni sebanyak 29 orang (52,7%). Lalu diikuti dengan responden yang hadir melakukan tanya jawab dengan pemerintah sebanyak 10 orang (18,2%), responden yang hadir hanya sebagai pendengar saja sebanyak 5 orang (9,1%), memberikan beberapa pengaruh pada apa yang di rencanakan 4 orang (7,3%), hadir dalam rapat/pertemuan memberikan masukan untuk pemerintah sebanyak 3 orang (5,5%) berturut-turut hadir untuk membagi tanggungjawab perencanaan dengan pemerintah dan diberikan limpahan kewenangan untuk membuat keputusan sebanyak 2 orang (3,6%). Tidak ada responden yang hadir dan memiliki kekuasaan penuh untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi rencana.

Penentuan kategori tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan tabel 1 dan tabel 2 diatas, dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Terdapat 1 variabel pertanyaan dengan pilihan jawaban pertanyaan ada 8 pilihan dengan skor masing-masing berkisar 1 sampai 8. Urutan skor tersebut didasarkan pada 8 tangga tingkat partisipasi masyarakat dari Sherry Arnstein. Sehingga minimum skor yang diperoleh untuk setiap individu (1×1) adalah 1, maksimum skor yang diperoleh untuk setiap individu (1×8) adalah 8, maka bila jumlah sampel 55, dapat diketahui skor minimum untuk tingkat partisipasi masyarakat (55×1) adalah 55 dan skor maksimum (55×8) adalah 440. Dengan diketahuinya skor minimum dan maksimum maka diketahui pula jarak interval, yaitu $(440-55)/8 = 48,125$. Maka bila digunakan tipologi dari Arnstein, dapat diketahui tingkat

partisipasi masyarakat dalam kehadiran yaitu, 1. *Citizen Control* (391,875-440,000), 2. *Delegated Power* (343,760-391,875), 3. *Partnership* (295,626-343,750), 4. *Placation* (247,600-295,625), 5. *Consultation* (199,376-247,500), 6. *Informing* (151,260-199,375), 7. *Therapy* (103,126-151,250), 8. *Manipulation* (55,000 -103,125)

Dengan demikian bila total skor yang diperoleh dari hasil analisis pada tabel 1 adalah 178, maka tingkat partisipasi masyarakat dalam kehadiran mengikuti rapat/pertemuan tahun 2011 termasuk kategori tingkat *Informing* (Tangga ketiga dari delapan Tangga Arnstein). Untuk tabel 2 total skor yang diperoleh dari hasil analisis adalah 184, maka tingkat partisipasi masyarakat dalam kehadiran mengikuti rapat/pertemuan tahun 2012 Juga termasuk kategori tingkat *Informing* (Tangga ketiga dari delapan Tangga Arnstein).

Pada tingkat *informing* (informasi) dapat diartikan bahwa tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan karena adanya:

- a. Pemberian informasi kepada masyarakat yang ikut dilibatkan dengan mengundangnya untuk berpartisipasi dalam musrenbang kecamatan sanana tahun 2011.
- b. Dalam hal ini, informasi diberikan lewat surat dan lewat forum pertemuan.
- c. Pada tingkat *Informing* ini termasuk dalam derajat tokenisme/ penghargaan atau *Degree of Tokenism*, yaitu suatu tingkat partisipasi dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan.

ANALISIS KEAKTIFAN MENGEMUKAKAN MASUKAN/ SARAN/USUL.

Untuk mengukur tingkat keaktifan mengemukakan masukan/saran/usul digunakan skala penilaian yang mengacu pada Tangga Partisipasi Masyarakat Sherry Arnstein yang terdiri dari 8 tangga,

694 berturut-turut dari tangga 1 sampai dengan 8 sebagai berikut: (1) tidak memberikan masukan/saran/usul; (2) memberikan masukan tetapi untuk kepentingan pemerintah; (3) memberikan masukan untuk kepentingan masyarakat; (4) memberikan masukan dengan cara dialog dua arah dengan pemerintah; (5) memberikan masukan dan usulannya diperhatikan sesuai kebutuhannya; (6) memberikan masukan dan tercapai kesamaan kepentingan dengan pemerintah; (7) memberikan masukan dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan; (8) memberikan masukan dan memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana. Tingkat keaktifan dalam mengemukakan masukan/saran/usul dapat dilihat pada Tabel 3.

TABEL 3. TINGKAT KEAKTIFAN DALAM MENGEMUKAKAN MASUKAN/SARAN/USUL PADA MUSRENBANG KECAMATAN SANANA TAHUN 2011

No	Variabel	Skala Penilaian	N	%	Bobot	N x Bobot	Jumlah Variabel
1	Keaktifan mengemukakan masukan, saran, usul.	Tidak memberikan masukan	5	9,1	1	5,0	193,0
		Masukan untuk kepentingan pemerintah	3	5,5	2	6,0	
		Masukan untuk kepentingan masyarakat	22	40,0	3	66,0	
		Masukan dengan dialog dua arah	11	20,0	4	44,0	
		Masukan dan usulan diperhatikan	12	21,8	5	60,0	
		Masukan dan tercapai kesamaan kepentingan	2	3,6	6	12,0	
		Masukan dan memiliki kewenangan keputusan	0	0,0	7	0,0	
		Masukan dan kekuasaan penuh	0	0,0	8	0,0	
			55	100			

Sumber: Hasil Analisis

Sebagaimana terlihat pada tabel 3. diatas kebanyakan responden memberikan masukan untuk kepentingan masyarakat yakni 22 orang (40,0%), memberikan masukan dan usulannya diperhatikan sesuai dengan kebutuhan yakni 12 orang (21,8%), memberikan masukan dengan cara dialog dua arah dengan pemerintah sebanyak 11 orang (20,0%), tidak memberikan masukan sebanyak 5 orang (9,1%), memberikan masukan untuk kepentingan pemerintah sebanyak 3 orang (5,5%), dan yang terkecil memberikan masukan dan tercapainya kesamaan kepentingan dengan pemerintah sebanyak 2 orang (3,6%). Sedangkan tidak ada tingkat keaktifannya dalam mengemukakan masukan/saran/usul dengan alasan sebagai berikut, yaitu: memberikan masukan dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana dan memberikan masukan, memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi rencana.

TABEL 4. TINGKAT KEAKTIFAN DALAM MENGEMUKAKAN MASUKAN/SARAN/USUL PADA MUSRENBANG KECAMATAN SANANA TAHUN 2012

No	Variabel	Skala Penilaian	N	%	Bobot	N x Bobot	Jumlah Variabel
1	Keaktifan mengemukakan masukan, saran, usul.	Tidak memberikan masukan	7	12,7	1	7	192,0
		Masukan untuk kepentingan pemerintah	2	3,6	2	4	
		Masukan untuk kepentingan masyarakat	20	36,4	3	60	
		Masukan dengan dialog dua arah	15	27,3	4	60	
		Masukan dan usulan diperhatikan	7	12,7	5	35	
		Masukan dan tercapai kesamaan kepentingan	2	3,6	6	12	
		Masukan dan memiliki kewenangan keputusan	2	3,6	7	14	
		Masukan dan kekuasaan penuh	0	,0	8	0	
			55	100			

Sumber: Hasil Analisis

Analisis pada tabel 4 di atas kebanyakan responden memberikan masukan untuk kepentingan masyarakat yakni 20 orang (36,4%), memberikan masukan dan usulannya diperhatikan sesuai dengan kebutuhan yakni 7 orang (12,7%), memberikan masukan dengan cara dialog dua arah dengan pemerintah sebanyak 15 orang (27,3%), tidak memberikan masukan sebanyak 7 orang (12,7%), memberikan masukan untuk kepentingan pemerintah sebanyak 2 orang (3,6%), dan yang terkecil memberikan masukan dan tercapainya kesamaan kepentingan dengan pemerintah sebanyak 2 orang (3,6%). memberikan masukan dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana sebanyak 2 orang (3,6%). Sedangkan tidak ada tingkat keaktifannya dalam mengemukakan masukan/saran/usul dengan alasan sebagai berikut, yaitu: memberikan masukan, memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi rencana.

Penentuan kategori tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan tabel 3 di atas, sebagaimana pada perhitungan tabel 1 di atas. Sehingga dengan demikian bila total skor yang diperoleh dari hasil analisis adalah 193,0, maka tingkat partisipasi masyarakat termasuk kategori tingkat *Informing* (Tangga ketiga dari delapan Tangga Arnstein). Untuk kategori tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan tabel 4 di atas juga dianalisis sebagaimana pada tabel 1. Sehingga dengan demikian bila total skor yang diperoleh dari hasil analisis adalah 1920, maka tingkat partisipasi masyarakat juga termasuk dalam kategori tingkat *Informing* (Tangga ketiga dari delapan Tangga Arnstein).

Pada tingkat *Informing* (Informasi) dapat diartikan bahwa keaktifan mengemukakan masukan/saran/usul dikarenakan:

- a. Bahwa pemerintah mengundang opini masyarakat setelah diberikan informasi kepada masyarakat. Terbukti dengan dilibatkannya wakil masyarakat dalam musrenbang kecamatan sanana pada tahun 2011-2012.

- b. Telah terjadi dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat yang terlibat. Dan masyarakat memberikan masukan dan berdiskusi aktif lewat cara dialog dua arah.
- c. Meskipun telah terjadi dialog dua arah, akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Metode yang dipakai adalah pertemuan lingkungan masyarakat dan dengar pendapat dengan masyarakat.

TABEL 5 TINGKAT KETERLIBATAN DALAM MENETAPKAN KONSEP RENCANA PADA MUSRENBANG KECAMATAN SANANA TAHUN 2011

No	Variabel	Skala Penilaian	N	%	Bobot	N x Bobot	Jumlah Variabel
1	Tingkat keterlibatan dalam menetapkan konsep rencana	Tidak ikut menetapkan	6	10,9	1	6,0	192,0
		Terlibat hanya untuk pemerintah	5	9,1	2	10,0	
		Terlibat untuk masyarakat	23	41,8	3	69,0	
		Terlibat diskusi aktif	12	21,8	4	48,0	
		Terlibat dan memberi pengaruh	1	1,8	5	5,0	
		Terlibat dan berbagi tanggungjawab	3	5,5	6	18,0	
		Terlibat dan memiliki kewenangan keputusan	4	7,3	7	28,0	
		Terlibat dan memiliki kekuasaan penuh	1	1,8	8	8,0	
			55	100			

Sumber: Hasil Analisis

ANALISIS KETERLIBATAN DALAM MENETAPKAN KONSEP RENCANA

Untuk mengukur tingkat keterlibatan dalam menetapkan konsep rencana digunakan skala penilaian yang mengacu pada Tangga Partisipasi Masyarakat Sherry Arnstein yang terdiri dari 8 tangga, berturut-turut dari tangga 1 sampai dengan 8 sebagai berikut: (1) tidak ikut menetapkan konsep rencana; (2) ikut menetapkan konsep rencana untuk kepentingan pemerintah; (3) ikut menetapkan kon-

sep rencana untuk kepentingan masyarakat; (4) ikut berdiskusi/berdialog aktif dalam menetapkan konsep rencana; (5) ikut menetapkan konsep dan memberi beberapa pengaruh pada konsep; (6) ikut menetapkan konsep dan saling berbagi tanggung jawab dengan pemerintah; (7) ikut menetapkan konsep dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan; (8) ikut menetapkan konsep dan memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana.

Berdasarkan pada tabel 5 diatas dapat diketahui presentase keterlibatan dalam menetapkan konsep rencana pada musrenbang Kecamatan Sanana tahun 2011 diantaranya:

Skala penilaian terbesar yakni keterlibatan menetapkan konsep rencana untuk kepentingan masyarakat sebanyak 23 orang (41,8%), kemudian ikut berdiskusi aktif dalam menetapkan konsep rencana yakni 12 orang (21,8%), tidak ikut menetapkan konsep rencana 6 Orang (10,9%), ikut menetapkan konsep rencana demi kepentingan pemerintah saja sebanyak 5 orang (9,1%), ikut menetapkan konsep rencana dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan diseluruh rencana sebanyak 4 orang (7,3%), ikut menetapkan konsep rencana dan saling berbagi tanggungjawab dengan pemerintah 3 orang (5.5%), dan berturut-turut 1 orang (1,8%) untuk menetapkan konsep dan memberikan beberapa pengaruh pada konsep rencana, serta ikut menetapkan konsep rencana dan memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi rencana.

Penentuan kategori tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan tabel 5 diatas, akan dianalisis sebagaimana pada perhitungan tingkat kategori pada tabel 1. Sehingga dengan demikian bila total skor yang diperoleh dari hasil analisis adalah 192,0 maka tingkat partisipasi masyarakat termasuk kategori tingkat *Informing* (Tangga ketiga dari delapan Tangga Arnstein).

Pada tingkat *Informing* (Informasi) dapat diartikan bahwa

- keterlibatan dalam menetapkan kosep rencana disebabkan karena
1. Bahwa pemerintah mengundang opini masyarakat setelah diberikan informasi kepada masyarakat. Terbukti dengan dilibatkannya wakil masyarakat dalam musrenbang kecamatan sanana pada tahun 2011.
 2. Telah terjadi dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat yang terlibat. Dan masyarakat memberikan masukan dan berdiskusi aktif lewat cara dialog dua arah.
 3. Meskipun telah terjadi dialog dua arah, akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Metode yang dipakai adalah pertemuan lingkungan masyarakat dan dengar pendapat dengan masyarakat.

TABEL 6. TINGKAT KETERLIBATAN DALAM MENETAPKAN KONSEP RENCANA PADA MUSRENBANG KECAMATAN SANANA TAHUN 2012

No	Variabel	Skala Penilaian	N	%	Bobot	N x Bobot	Jumlah Variabel
1	Tingkat keterlibatan dalam menetapkan konsep rencana	Tidak ikut menetapkan	4	7,3	1	4	210,0
		Terlibat hanya untuk pemerintah	4	7,3	2	8	
		Terlibat untuk masyarakat	22	40,0	3	66	
		Terlibat diskusi aktif	14	25,5	4	56	
		Terlibat dan memberi pengaruh	0	,0	5	0	
		Terlibat dan berbagi tanggungjawab	3	5,5	6	18	
		Terlibat dan memiliki kewenangan keputusan	6	10,9	7	42	
		Terlibat dan memiliki kekuasaan penuh	2	3,6	8	16	
			55	100			

Sumber: Hasil Analisis

Untuk tahun 2012 pada tabel 6 skala penilaian terbesar yakni keterlibatan menetapkan konsep rencana untuk kepentingan masyarakat sebanyak 22 orang (40,0%), kemudian ikut berdiskusi

700 aktif dalam menetapkan konsep rencana yakni 14 orang (25,5%), tidak ikut menetapkan konsep rencana 4 Orang (7,3%), ikut menetapkan konsep rencana demi kepentingan pemerintah saja sebanyak 4 orang (7,3%), ikut menetapkan konsep rencana dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dominan diseluruh rencana sebanyak 6 orang (10,9%), ikut menetapkan konsep rencana dan saling berbagi tanggungjawab dengan pemerintah 3 orang (5.5%), ikut menetapkan konsep rencana dan memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi rencana sebanyak 2 Orang (3,6%). Sedangkan tidak ada tingkat keaktifannya dalam mengemukakan masukan/saran/usul dengan alasan sebagai berikut, yaitu: menetapkan konsep dan memberikan beberapa pengaruh pada konsep rencana.

Penentuan kategori tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan tabel 6 diatas, akan dianalisis sebagaimana pada perhitungan tingkat kategori pada tabel 1. Sehingga dengan demikian bila total skor yang diperoleh dari hasil analisis adalah 210,0 maka tingkat partisipasi masyarakat termasuk kategori tingkat *Consultation* (Tangga keempat dari delapan Tangga Arnstein).

Pada tingkat *Consultation* (konsultasi) dapat diartikan bahwa tingkat keterlibatan dalam menetapkan konsep rencana terjadi karena:

- a. Bahwa pemerintah mengundang opini masyarakat setelah diberikan informasi kepada masyarakat. Terbukti dengan dilibatkannya wakil masyarakat dalam musrenbang kecamatan sanana tahun 2012.
- b. Telah terjadi dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat yang terlibat. Dan masyarakat memberikan masukan dan berdiskusi aktif lewat cara dialog dua arah tersebut.
- c. Meskipun telah terjadi dialog dua arah, akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Metode yang

dipakai adalah pertemuan lingkungan masyarakat dan dengar pendapat dengan masyarakat.

- d. Pada tingkat *Consultation* ini termasuk dalam derajat tokenisme/ penghargaan atau *Degree of Tokenism*, yaitu suatu tingkat partisipasi dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan.

TABEL 7. TINGKAT KETERLIBATAN DALAM MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN RENCANA PADA MUSRENBANG KECAMATAN SANANA TAHUN 2011

No	Variabel	Skala Penilaian	N	%	Bobot	N x Bobot	Jumlah Variabel
1	Keterlibatan memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana	Tidak memberikan persetujuan	5	9,1	1	5,0	195,0
		persetujuan hanya untuk pemerintah	2	3,6	2	4,0	
		persetujuan hanya untuk masyarakat	25	45,5	3	75,0	
		Persetujuan karena ada dialog dua arah	4	7,3	4	16,0	
		Persetujuan karena usulan diperhatikan	19	34,5	5	95,0	
		Persetujuan karena ada kesamaan kepentingan	0	0,0	6	0,0	
		Persetujuan karena memiliki kewenangan keputusan	0	0,0	7	0,0	
		Persetujuan karena memiliki kekuasaan penuh	0	0,0	8	0,0	
			55	100			

Sumber: Hasil Analisis

ANALISIS KETERLIBATAN DALAM MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN RENCANA.

Untuk mengukur tingkat keterlibatan dalam memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana digunakan skala penilaian yang mengacu pada tangga partisipasi masyarakat Sherry Arnstein

702 yang terdiri dari 8 tangga, berturut-turut dari tangga 1 sampai dengan 8 sebagai berikut: (1) tidak memberikan persetujuan; (2) memberikan persetujuan untuk kepentingan pemerintah; (3) memberikan persetujuan karena untuk kepentingan masyarakat; (4) memberikan persetujuan karena telah terjadi dialog dua arah dengan pemerintah; (5) memberikan persetujuan karena usulan dari masyarakat diperhatikan; (6) memberikan persetujuan karena telah ada kesamaan kepentingan dengan pemerintah; (7) memberikan persetujuan setelah diberi kewenangan untuk membuat keputusan dominan; (8) memberikan persetujuan setelah diberi kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi rencana. Tingkat keterlibatan dalam memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Berdasarkan pada tabel 7 di atas tergambar bahwa kebanyakan responden memberikan persetujuan untuk kepentingan masyarakat sebanyak 25 orang (45,5%), memberikan persetujuan karena usulan masyarakat diperhatikan sebanyak 19 orang (34,5%), tidak memberikan persetujuan sebanyak 5 orang (9,1%), memberikan persetujuan karena terjadi dialog dua arah dengan pemerintah sebanyak 4 orang (7,3%), memberikan persetujuan demi kepentingan pemerintah sebanyak 2 orang (3,6%), sedangkan untuk skala penilaian yang lain tidak ada keterlibatan masyarakat dalam memberikan persetujuan.

Pada tabel 8 di atas tergambar bahwa kebanyakan responden memberikan persetujuan untuk kepentingan masyarakat sebanyak 25 orang (45,5%), memberikan persetujuan karena usulan masyarakat diperhatikan sebanyak 16 orang (29,1%), tidak memberikan persetujuan sebanyak 4 orang (7,3%), memberikan persetujuan karena terjadi dialog dua arah dengan pemerintah sebanyak 7 orang (12,7%), memberikan persetujuan demi kepentingan pemerintah sebanyak 2 orang (3,6%), dan memberikan persetujuan setelah diberikan kekuasaan untuk merencanakan,

melaksanakan, dan mengawasi rencana sebanyak 1 responden (1,8%). Tidak ada yang dalam keterlibatannya memberikan persetujuan rancangan rencana karena alasan-alasan sebagai berikut: memberikan persetujuan karena ada kesamaan kepentingan dengan pemerintah, memberikan persetujuan setelah diberi kewenangan untuk membuat keputusan dominan di keseluruhan rencana.

TABEL 8 TINGKAT KETERLIBATAN DALAM MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN RENCANA PADA MUSRENBANG KECAMATAN SANANA TAHUN 2012

Variabel	Skala Penilaian	N	%	Bobot	N x Bobot	Jumlah Variabel
Keterlibatan memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana .	Tidak memberikan persetujuan	4	7,3	1	4	199,0
	persetujuan hanya untuk pemerintah	2	3,6	2	4	
	persetujuan hanya untuk masyarakat	25	45,5	3	75	
	Persetujuan karena ada dialog dua arah	7	12,7	4	28	
	Persetujuan karena usulan diperhatikan	16	29,1	5	80	
	Persetujuan karena ada kesamaan kepentingan	0	,0	6	0	
	Persetujuan karena memiliki kewenangan keputusan	0	,0	7	0	
	Persetujuan karena memiliki kekuasaan penuh	1	1,8	8	8	
		55	100			

Sumber: Hasil Analisis

Penentuan kategori tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan tabel 7 diatas, akan dianalisis sebagaimana pada perhitungan tingkat kategori pada tabel 1. Sehingga dengan demikian bila total skor yang diperoleh dari hasil analisis adalah 195, 0 maka tingkat partisipasi masyarakat termasuk kategori tingkat *Informing* (Tangga ketiga dari delapan Tangga Arnstein). Penentuan kategori tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan tabel 8 diatas, akan dianalisis sebagaimana pada perhitungan tingkat kategori pada tabel 1. Sehingga dengan demikian bila total skor yang diperoleh dari hasil

704 analisis adalah 199,0 maka tingkat partisipasi masyarakat pada tahun 2012 juga termasuk dalam kategori tingkat *Informing* (Tangga ketiga dari delapan Tangga Arnstein).

Pada tingkat *Informing* (Informasi) dapat diartikan bahwa keterlibatan dalam memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana disebabkan karena:

- a. Bahwa pemerintah mengundang opini masyarakat setelah diberikan informasi kepada masyarakat. Terbukti dengan dilibatkannya wakil masyarakat dalam musrenbang kecamatan sanana pada tahun 2011-2012
- b. Telah terjadi dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat yang terlibat. Dan masyarakat memberikan masukan dan berdiskusi aktif lewat cara dialog dua arah.
- c. Meskipun telah terjadi dialog dua arah, akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Metode yang dipakai adalah pertemuan lingkungan masyarakat dan dengar pendapat dengan masyarakat.

TABEL 9 TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PADA MUSRENBANG

No	Variabel	Jumlah Skor Variabel	Keterangan Tingkat
1	Tingkat Kehadiran dalam rapat/Pertemuan	178	<i>Informing</i>
2	Keaktifan dalam mengemukakan masukan/saran/usul	193	<i>Informing</i>
3	Keterlibatan dalam menetapkan konsep rencana	192	<i>Informing</i>
4	Keterlibatan dalam memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana	195	<i>Informing</i>
5	Jumlah	758	<i>informing</i>

Sumber: Hasil Analisis

ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA KESELURUHAN

Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang kecamatan

sanana tahun dapat diketahui dengan menjumlahkan skor dari tiap variabel sebagaimana diuraikan diatas, yaitu variabel tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan, keaktifan mengemukakan masukan/saran/usul, keterlibatan dalam menetapkan konsep rencana, dan keterlibatan memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana. Hasil selengkapnya sebagaimana tabel berikut ini.

Bila dilihat dari tabel 9 diatas maka tingkat partisipasi yang paling tinggi berada pada keterlibatan dalam memberikan persetujuan dalam menetapkan rancangan rencana mendapat jumlah tertinggi (195) dan tingkat partisipasi paling rendah terdapat pada tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan dengan jumlah terendah (178).

TABEL 10. TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PADA MUSRENBANG

No	Variabel	Jumlah Skor Variabel	Keterangan Tingkat
1	Tingkat Kehadiran dalam rapat/Pertemuan	184	<i>Informing</i>
2	Keaktifan dalam mengemukakan masukan/saran/usul	192	<i>Informing</i>
3	Keterlibatan dalam menetapkan konsep rencana	210	<i>Consultation</i>
4	Keterlibatan dalam memberikan persetujuan terhadap rancangan rencana	199	<i>Informing</i>
5	Jumlah	785	<i>informing</i>

Sumber: Hasil Analisis

Dari tabel 10 diatas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi yang paling tinggi berada pada keterlibatan dalam menetapkan konsep rencana mendapat jumlah tertinggi (210) dan tingkat partisipasi paling rendah terdapat pada tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan dengan jumlah terendah (184).

Penentuan kategori tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan tabel 9 dan tabel 10 diatas, dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Terdapat 4 kriteria pertanyaan dengan pilihan jawaban masing-masing pertanyaan ada 8 pilihan dengan skor masing-masing berkisar 1 sampai 8. Sehingga minimum skor yang diperoleh untuk setiap individu (4×1) adalah 4, maksimum skor yang diperoleh untuk setiap individu (4×8) adalah 32, Skor minimum akan diperoleh

706 dari $55 \times 4 = 220$ (Jumlah sampel dikali skor terendah) dan skor maksimum akan diperoleh dari $55 \times 32 = 1760$ (Jumlah Sampel dikali Skor Tertinggi) Dengan diketahuinya skor minimum dan maksimum maka diketahui pula jarak intervalnya yaitu, $1760-220/8=192,5$ (Skore tertinggi dikurangi skor terendah) dibagi 8. Dengan demikian, jika menggunakan tipologi dari Arnstien dengan 8 indikator tingkat partisipasi maka interval tipologi Arnstein dapat diuraikan sebagai berikut: 1. *Citizen Control* (1567,600-1760,000), 2. *Delegated Power* (1376,000-1567,500), 3. *Partnership* (1182,600-1375,000), 4. *Placation* (991,000-1182,500), 5. *Consultation* (797,600-990,000), 6. *Informing* (606,000-797,500), 7. *Therapy* (412,600-605,000), 8. *Manipulation* (220,000-412,500).

Dengan demikian bila total skor yang diperoleh dari hasil analisis adalah tingkat partisipasi masyarakat pada tahun 2011 adalah 758, maka secara keseluruhan tingkat partisipasi masyarakat termasuk kategori tingkat *informing* (Tangga ketiga dari delapan Tangga Arnstein). Jumlah skor Untuk partisipasi masyarakat pada musrenbang tahun 2012 adalah 785, maka secara keseluruhan tingkat partisipasi masyarakat termasuk kategori tingkat *informing* (Tangga ketiga dari delapan Tangga Arnstein). Tingkat partisipasi masyarakat pada tahun 2011-2012 yang masih berada pada kategori tingkat *Informing* ini menunjukkan bahwa:

- a. Bahwa pemerintah mengundang opini masyarakat setelah diberikan informasi kepada masyarakat. Terbukti dengan dilibatkannya wakil masyarakat dalam musrenbang kecamatan sanana pada tahun 2011-2012.
- b. Telah terjadi dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat yang terlibat. Dan masyarakat memberikan masukan dan berdiskusi aktif lewat cara dialog dua arah.
- c. Meskipun telah terjadi dialog dua arah, akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Metode yang

dipakai adalah pertemuan lingkungan masyarakat dan dengar pendapat dengan masyarakat.

- d. Pada tingkat *Informing* ini termasuk dalam derajat tokenisme/ penghargaan atau *Degree of Tokenism*, yaitu suatu tingkat partisipasi dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan.

Jawaban responden terhadap pertanyaan terbuka tentang usulan tingkat partisipasi masyarakat, sebagian besar responden berharap agar masukan saran dari masyarakat lebih memberi pengaruh pada rencana jadi ada jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Responden juga mengusulkan agar dialog pemerintah dan masyarakat lebih diintensifkan lagi. Usulan tingkat partisipasi lainnya yaitu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pembuatan keputusan, berbagi tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat, serta masyarakat diberi kewenangan membuat keputusan pada rencana. Semua usulan masyarakat tersebut menunjukkan adanya keinginan masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya lebih tinggi lagi, lebih dari sekedar tingkat *Consultation (Degree of Tokenism)* saja. Untuk itu di masa mendatang pemerintah berkewajiban memfasilitasinya agar dapat mencapai derajat kekuatan masyarakat (*Degree of Citizen Power*).

Pada pembahasan berikut ini, akan dibahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada musrenbang kecamatan sanana tahun 2011-2012, yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, sehingga dapat berpengaruh pada derajat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang pada tahun 2011-2012.

708 ANALISIS FAKTOR-FAKTOR INTERNAL

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat meliputi faktor-faktor yang berasal dari individu responden sendiri, meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Hasil perhitungan distribusi frekuensi selengkapnya sebagaimana tabel berikut ini

TABEL 11 DISTRIBUSI FREKUENSI FAKTOR-FAKTOR INTERNAL TAHUN 2011

No	Kriteria	Frekuensi	%
A	Jenis kelamin		
1	Pria	45	81,8
2	Wanita	10	18,2
B	Usia		
1	20-30 tahun	6	10,9
2	31-40 tahun	12	21,8
3	41-50 tahun	17	30,9
4	50 tahun keatas	20	36,4
C	Pendidikan		
1	Sarjana	7	12,7
2	Sarjana muda/diploma	2	3,6
3	Lulus SMA atau sederajat	33	60,0
4	Lulus SMP atau sederajat	8	14,5
5	Lulus SD atau sederajat	5	9,1
D	Pekerjaan		
1	PNS/TNI	11	20,0
2	Pensiunan	4	7,3
3	Kepala Desa/Kelurahan	6	10,9
4	Pegawai Swasta	3	5,5
5	Wiraswata	14	25,5
6	Lain-lain	17	30,9
E	Penghasilan		
1	Kurang dari Rp.500.000,-	26	47,3
2	Rp.500.000,- s/d Rp.799.000,-	7	12,7
3	Rp.800.000,- s/d Rp.1.099.000,-	7	12,7
4	Rp.1.100.000,- s/d Rp.1.400.000	1	1,8
5	Lebih dari Rp.1.400.000,-	14	25,5

Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan hasil perhitungan distribusi frekuensi pada tabel 11 diatas, faktor jenis kelamin responden yang terlibat dalam

musrenbang Kecamatan Sanana Tahun 2011 terdiri dari dominan jenis kelamin pria sebanyak 45 orang (81,8%) dan wanita sebanyak 10 orang (18,2%). Untuk hasil perhitungan distribusi frekuensi usia responden maka diperoleh bahwa sebagian besar responden memiliki usia lebih dari 50 tahun yaitu sebanyak 20 orang (36,4%), kemudian diikuti responden dengan usia 41-50 tahun sebanyak 17 orang (30,9%), responden dengan usia 31-40 tahun sebanyak 12 orang (21,8%), dan yang berusia 20-30 tahun 6 (10,9%). Distribusi frekuensi pendidikan responden pada tahun 2011 yaitu, sebagian besar responden memiliki pendidikan tamat SMA atau sederajat yaitu sebanyak 33 orang (60,0%), kemudian diikuti responden dengan pendidikan tamat SMP atau sederajat sebanyak 8 orang (14,5%), responden dengan pendidikan Sarjana sebanyak 7 orang (12,7%), dan responden yang berpendidikan tamat SD atau sederajat 5 orang (9,1%). responden dengan pendidikan Sarjana Muda/Diploma sebanyak 2 orang (3,6%). Dari keseluruhan perhitungan tersebut dapat dilihat dominasi dari tingkat pendidikan menengah kebawah lebih besar dengan perolehan akumulatif sebanyak 46 orang (83,6%). Hal ini tentunya akan berpengaruh pada tata cara berpartisipasi.

Untuk distribusi frekuensi pekerjaan responden pada tahun 2011 maka diperoleh bahwa sebagian besar responden memiliki pekerjaan lain yakni sebagai petani 17 orang (30,9%), wiraswasta sebanyak 14 orang (25,5%) sedangkan yang bekerja sebagai PNS sebanyak 11 orang (20,0%) terdiri dari sekdes yang telah berstatus sebagai PNS. Yang bekerja sebagai Kepala Desa 6 orang (10,9%), pensiunan 4 orang (7,3%), dan Pegawai Swasta 3 orang (5,5%).

Tingkat penghasilan berpengaruh pada seseorang, Dapat dikatakan bahwa mata pencaharian/jenis pekerjaan dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan karena pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam

TABEL 12 DISTRIBUSI FREKUENSI
 FAKTOR-FAKTOR INTERNAL TAHUN 2012

No	Kriteria	Frekuensi	%
A Jenis kelamin			
1	Pria	43	78,2
2	Wanita	12	21,8
B Usia			
1	20-30 tahun	8	14,5
2	31-40 tahun	12	21,8
3	41-50 tahun	17	30,9
4	50 tahun keatas	18	32,7
C Pendidikan			
1	Sarjana	6	10,9
2	Sarjana muda/diploma	2	3,6
3	Lulus SMA atau sederajat	29	52,7
4	Lulus SMP atau sederajat	8	14,5
5	Lulus SD atau sederajat	10	18,2
D Pekerjaan			
1	PNS/TNI	11	20,0
2	Pensiunan	2	3,6
3	Kepala Desa/Kelurahan	8	14,5
4	Pegawai Swasta	4	7,3
5	Wiraswata	11	20,0
6	Lain-lain	19	34,5
E Penghasilan			
1	Kurang dari Rp.500.000,-	31	56,4
2	Rp.500.000,- s/d Rp.799.000,-	6	10,9
3	Rp.800.000,- s/d Rp.1.099.000,-	7	12,7
4	Rp.1.100.000,- s/d Rp.1.400.000	1	1,8
5	Lebih dari Rp.1.400.000,-	10	18,2

Sumber: Hasil Analisis

hal menghadiri pertemuan. Tingkat penghasilan responden sesuai dengan tabel distribusi frekuensi faktor internal pada musrenbang tahun 2011 di atas dapat digambarkan sebagai berikut. Sebagian besar responden berpenghasilan rendah yakni Kurang dari Rp.500.000,- sebanyak 26 orang (47,3%), dan tingkat pendapatan yang paling tinggi dengan penghasilan Lebih dari Rp.1.400.000,- sebanyak 14 orang (25,5%), jika diakumulasi secara keseluruhan

maka pendapatan responden dapat di kategorikan rendah dengan akumulasi (72,7%).

711

Untuk hasil perhitungan distribusi frekuensi pada tabel 12 diatas, faktor jenis kelamin responden yang terlibat dalam musrenbang kecamatan sanana tahun 2012 terdiri dari dominan jenis kelamin pria sebanyak 43 orang (72,2%) dan wanita sebanyak 12 orang (21,8%). Dari tabel diatas menunjukkan bahwa partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita adalah berbeda. Hal ini disebabkan adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat antara pria dan wanita. Perbedaan kedudukan dan derajat ini, akan menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Menurut Soedarno et. al (1992) dalam Yulianti (2000:34), bahwa di dalam sistem pelapisan atas dasar seksualitas ini, golongan pria memiliki sejumlah hak istimewa dibandingkan golongan wanita. Dengan demikian maka kecenderungannya kelompok pria akan lebih banyak ikut berpartisipasi dari pada kelompok wanita.

Berdasarkan hasil perhitungan distribusi frekuensi usia responden pada tabel 12 maka diperoleh bahwa sebagian besar responden memiliki usia lebih dari 50 tahun yaitu sebanyak 18 orang (32,7%), kemudian diikuti responden dengan usia 41-50 tahun sebanyak 17 orang (30,9%), responden dengan usia 31-40 tahun sebanyak 12 orang (21,8%), dan yang berusia 20-30 tahun 8 (14,5%). Dari perhitungan diatas terlihat bahwa masyarakat yang berpartisipasi semuanya tergolong dalam usia produktif (15-64 tahun). Dari usia produktif tersebut dominan berusia matang (lebih dari 50 tahun) yaitu 32,7%. Hal ini menunjukkan adanya senioritas dalam berpartisipasi. Perbedaan usia juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, karena dalam masyarakat terdapat pembedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga akan memunculkan golongan tua dan golongan muda, yang berbeda-beda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan

712 mengambil keputusan (Soedarno et. al,1992 dalam Yulianti,2000:34). Usia berpengaruh pada keaktifan seseorang untuk berpartisipasi (Slamet, 1994:142). Dalam hal ini golongan tua yang dianggap lebih berpengalaman atau senior, akan lebih banyak memberikan pendapat dan dalam hal menetapkan keputusan.

Untuk hasil perhitungan distribusi frekuensi pendidikan responden pada tahun 2012 diperoleh bahwa sebagian besar responden memiliki pendidikan tamat SMA atau sederajat yaitu sebanyak 29 orang (52,7%), kemudian diikuti responden dengan pendidikan tamat SMP atau sederajat sebanyak 8 orang (14,5%), responden dengan pendidikan Sarjana sebanyak 6 orang (10,9%), dan responden yang berpendidikan tamat SD atau sederajat 10 orang (18,2%). responden dengan pendidikan Sarjana Muda/Diploma sebanyak 2 orang (3,6%). Dari keseluruhan perhitungan tersebut dapat dilihat dominasi dari tingkat pendidikan menengah kebawah lebih besar dengan perolehan akumulatif sebanyak 46 orang (85,4%). Menurut Litwin (1986) dalam Yulianti (2000:34) menyatakan bahwa, salah satu karakteristik partisipan dalam pembangunan partisipatif adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang usaha-usaha partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pembangunan. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi latar belakang pendidikannya, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan. Faktor pendidikan dianggap penting karena dengan melalui pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap terhadap inovasi.

Distribusi frekuensi pekerjaan responden pada tahun 2012 diperoleh bahwa sebagian besar responden memiliki pekerjaan lain yakni sebagai petani dan nelayan sebanyak 19 orang (34,5%), wiraswasta sebanyak 11 orang (20,0%) sedangkan yang bekerja

sebagai PNS sebanyak 11 orang (20,0%) terdiri dari sekdes yang telah berstatus sebagai PNS. Yang bekerja sebagai Kepala Desa 8 orang (14,5%), pensiunan 2 orang (3,6%), dan Pegawai Swasta 4 orang (7,3%). Tingkat penghasilan responden sesuai dengan tabel distribusi frekuensi faktor internal pada musrenbang tahun 2012 diatas tergambar bahwa Sebagian besar respponden berpenghasilan rendah yakni Kurang dari Rp.500.000,- sebanyak 31 orang (56,4%), dan tingkat pendapatan yang paling tinggi dengan penghasilan Lebih dari Rp.1.400.000,- sebanyak 10 orang (18,2%). Rendahnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih kecil bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Tingkat penghasilan yang tidak mencukupi akan mempengaruhi waktu luang masyarakat karena mereka disibukkan dengan mencari tambahan penghasilan sehingga kurang aktif untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan.

TABEL 13 DISTRIBUSI FREKUENSI FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL TAHUN 2011

No	Kreteria	Frekuensi	%
A	Peran Pemerintah dalam pembinaan		
1	Sangat sering (> 66%)	12	21,8
2	Cukup sering (34% - 66%)	17	30,9
3	Kurang (1% - 33%)	16	29,1
4	Tidak ada (0%)	10	18,2
B	Peran Stakholders		
1	Sangat terlibat (> 66%)	7	12,7
2	Cukup terlibat (34% - 66%)	31	56,4
3	Kurang terlibat (1% - 33%)	14	25,5
4	Tidak terlibat (0%)	3	5,5

Sumber: Hasil Analisis

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat meliputi semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program kecuali masyarakat. Faktor-faktor eksternal tersebut adalah peran pemerintah dalam pembinaan

714 dan pemberian informasi kepada masyarakat, serta peran stakeholders. Hasil perhitungan distribusi frekuensi selengkapnya sebagaimana tabel berikut ini.

TABEL 14 DISTRIBUSI FREKUENSI FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL TAHUN 2012

No	Kreteria	Frekuensi	%
A	Peran Pemerintah dalam pembinaan		
1	Sangat sering (> 66%)	13	23,6
2	Cukup sering (34% - 66%)	18	32,7
3	Kurang (1% - 33%)	16	29,1
4	Tidak ada (0%)	8	14,5
B	Peran Stakholders		
1	Sangat terlibat (> 66%)	9	16,4
2	Cukup terlibat (34% - 66%)	28	50,9
3	Kurang terlibat (1% - 33%)	15	27,3
4	Tidak terlibat (0%)	3	5,5

Sumber: Hasil Analisis

Dari tabel 13 diatas tergambar bahwa peran pemerintah dalam pembinaan dan pemberian informasi kepada masyarakat pada musrenbang tahun 2011 cukup sering (34%-66%) dengan jumlah responden 17 orang (30,9%) dan kategori sangat sering (>66%) dengan jumlah responden 12 (21,8%), akumulasi dari peran pemerintah ini dapat dilihat presentase sangat sering dan cukup sering sebesar (52,7%).

Sementara itu dari tabel 14 diatas menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pembinaan dan pemberina informasi kepada masyarakat pada musrenbang tahun 2012 cukup sering (34%-66%) dengan jumlah responden 18 orang (32,7%) dan kategori sangat sering (>66%) dengan jumlah responden 13 (23,6%), akumulasi dari peran pemerintah ini dapat dilihat presentase sangat sering dan cukup sering sebesar (56,3%)

Jumlah ini menunjukkan peran pemerintah dalam memberikan informasi dan pembinaan kepada masyarakat sudah cukup baik, hanya saja proses tersebut dilakukan pada saat musrenbang,

sedangkan masyarakat seharusnya memiliki informasi secara utuh tentang pelaksanaan pembangunan agar bisa dievaluasi pada musrenbang berikutnya.

715

Terkait dengan peran pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Informasi ini berupa undangan bagi para peserta musrenbang kecamatan sanana yang terdiri dari kepala desa, sekretaris, tokoh agama, tokoh pemuda dan perwakilan perempuan (PKK). Informasi tidak secara lengkap disampaikan hanya pada saat akan dilaksanakan kegiatan musrenbang, informasi tentang tindak lanjut tentang hasil musrenbang itu tidak diketahui apakah usulan diterima atau tidak. (Wawancara dengan Sekretaris Desa Fagudu Kecamatan Sanana Bapak Sunaryo tanggal 3 Mei 2013 pukul 10.00 pagi WIT).

Masyarakat pada dasarnya menginginkan peran yang lebih aktif dari pemerintah daerah, peran aktif ini dapat dilakukan dengan keterbukaan informasi pembangunan bukan hanya pada tahapan perencanaan namun juga pada tahapan pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Informasi perencanaan pembangunan melalui musrenbang kecamatan sanana telah disampaikan kepada masyarakat melalui undangan terbuka kepada perwakilan masyarakat tingkat desa. Penyebaran informasi memang belum maksimal karena tidak keadaannya yang tidak memungkinkan, tidak tersedianya media lokal yang dapat diakses secara luas menyebabkan publikasi informasi melalui media baik cetak maupun elektronik tidak dapat dilakukan. (Hasil Wawancara Sekretaris Bappeda Bapak Drs. Hardiman Teapon M.si Pada Tanggal 13 Mei pukul 09.00 pagi WIT)

Turut aktifnya masyarakat dalam pembangunan tersebut dapat meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat kearah yang lebih baik atau dalam bahasa Sherry Arnstein (1969) disebutkan sebagai *Citizen Control* (kontrol masyarakat). Pada tingkat *Citizen Control* ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Mereka

716 mempunyai kewenangan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Dalam hal ini usaha bersama warga dapat langsung berhubungan dengan sumber-sumber dana untuk mendapat bantuan atau pinjaman tanpa melalui pihak ketiga. Jadi masyarakat memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program yang dibuatnya.

Selain peran pemerintah terdapat juga peran *stakholder* yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Dari tabel distribusi frekuensi faktor-faktor eksternal diatas, peran *stakholders* pada musrenbang tahun 2011 Cukup terlibat (34%-66%) dengan jumlah responden 31 orang (56,4%), sangat terlibat (>66%) sebanyak 7 orang (12,7%) dan sisanya kurang bahkan tidak terlibat dengan presentase kecil. Untuk peran *stakholders* pada musrenbang tahun 2012 Dari tabel distribusi frekuensi faktor-faktor eksternal diatas, Cukup terlibat (34% - 66%) dengan jumlah responden 28 orang (50,9%), sangat terlibat (> 66%) sebanyak 9 orang (16,4%) dan sisanya kurang bahkan tidak terlibat dengan presentase kecil.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa keterlibatan *stakholder* dalam musrenbang Kecamatan Sanana cukup baik, sebagai kelompok kepentingan peran stakeholder ini menjadi penting dalam konteks pembangunan. Selain sebagai organisasi yang dapat mengkomunikasikan kepentingan masyarakat kepada pemerintah, *stakholder* juga dapat memainkan peran pengawasan yang lebih terhadap pembangunan hal ini dimungkinkan karena sumberdaya manusianya memadai. *Stakholder* yang terlibat pada musrenbang kecamatan sanana lebih didominasi oleh organisasi kemahasiswaan dan paguyuban lokal.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang hanya dilakukan untuk memnuhi kewajiban pemerintah dihadapan hukum, Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengharuskan

adanya forum musrenbang untuk menjangkau aspirasi pembangunan dari tingkat paling bawah (masyarakat). Forum multi-pihak yang diikuti oleh masyarakat dan stakholder ini belum mampu secara substansial menyerap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan eksekusi dalam bentuk paket kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Bahkan peran stakholder dalam mengawal agenda pembangunan ini tidak diberikan ruang yang lebih untuk bersama-sama mengambil keputusan tentang kebijakan yang akan dilakukan.

HUBUNGAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DENGAN FAKTOR INTERNAL

Hubungan tingkat partisipasi dengan faktor internal tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 15 HUBUNGAN TINGKAT PARTISIPASI DENGAN FAKTOR INTERNAL TAHUN 2011

Faktor Internal		Partisipasi	R tabel 5%
Usia	Pearson Correlation	0,089	0,266
	Sig. (2-tailed)	0,516	
	N	55	
Pendidikan	Pearson Correlation	0,301*	
	Sig. (2-tailed)	0,026	
	N	55	
Penghasilan	Pearson Correlation	0,315*	
	Sig. (2-tailed)	0,019	
	N	55	

Sumber: Hasil Analisis

Dari hasil tabel korelasi faktor internal dan tingkat partisipasi diatas jika dibaca menggunakan tabel korelasi *product moment* dengan responden sebanyak 55 orang maka faktor penghasilan sangat signifikan dengan tingkat partisipasi yakni 0.315*, faktor pendidikan: 0.301*, dan faktor usia yang memiliki korelasi rendah dengan nilai 0,89.

Untuk faktor internal dengan variabel jenis kelamin dan pekerjaan dilakukan uji statistik dengan menggunakan tabulasi silang (*crosstab*) dari beberapa variabel yang ada dengan memperhatikan nilai *chi square*. Setelah dilakukan uji *chi square* selanjutnya dilihat nilai hitung *chi square* dibandingkan dengan nilai tabelnya dengan taraf signifikansi 0,05. Dari perbandingan nilai ini menunjukkan ada tidaknya hubungan antara dua variabel. Jika nilai *chi square* hitung lebih besar dari nilai *chi square* tabel, maka pernyataan bahwa kedua variabel yang diuji tidak saling berhubungan harus ditolak. Sebaliknya jika nilai *chi square* hitung lebih kecil dari nilai *chi square* tabel, maka pernyataan bahwa kedua variabel yang diuji tidak saling berhubungan harus diterima. Berdasarkan probabilitas, bila nilai probabilitas (*Asymp.Sig*) < 0,05 maka H_0 ditolak artinya pernyataan bahwa kedua variabel yang diuji tidak saling berhubungan harus ditolak. Sebaliknya jika nilai probabilitas (*Asymp.Sig*) > 0,05 maka H_0 diterima artinya pernyataan bahwa kedua variabel yang diuji tidak saling berhubungan harus diterima.

TABEL 16. KORELASI *CHI SQUARE* UNTUK FAKTOR JENIS KELAMIN DAN PEKERJAAN DENGAN TINGKAT PARTISIPASI TAHUN 2011

Variabel		chi Square value	CC	df	Asymp. Sig. (2-sided)	r tabel 5%
Jenis kelamin	Pearson Chi-Square	27.738 ^a	0,579	16	0,034	26,296
	N of Valid Cases	55				
Pekerjaan	Pearson Chi-Square	85.919 ^a	0,781	80	0,305	101,879
	N of Valid Cases	55				

Sumber: Hasil Analisis

Koefisien kontingensi (*Contingency Coefficient/CC*) menunjukkan kuat dan lemahnya hubungan antara dua variabel yang diuji, dengan nilai koefisien kontingensi berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Bila nilai koefisien kontingensi mendekati 1, maka hubungan antara kedua variabel tersebut sangat kuat dan sebaliknya jika nilai koefisien

kontingensi tersebut semakin mendekati 0, maka hubungan antara kedua variabel tersebut semakin lemah. Untuk hubungan faktor internal (variabel jenis kelamin dan pekerjaan) dengan tingkat partisipasi tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 16.

Dari tabel 16. diatas tergambar bahwa koefisien kontingensi sebesar 0,579 dengan *Approx Sig.* Sebesar 0,034 (lebih kecil dari 0,050) menunjukkan bahwa adanya korelasi antara variabel jenis kelamin dengan variabel tingkat partisipasi kearah positif. Nilai *chi square* hitung dari jenis kelamin adalah 27.738 lebih besar dari nilai *chi square* tabel yaitu 26,295 hal ini menunjukkan adanya hubungan keeratan yang cukup signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat partisipasi masyarakat.

TABEL 17 HUBUNGAN TINGKAT PARTISIPASI DENGAN FAKTOR INTERNAL PADA TAHUN 2012

Faktor Internal		Partisipasi	R tabel 5%
Usia	Pearson Correlation	0,022	0,266
	Sig. (2-tailed)	0,872	
	N	55	
Pendidikan	Pearson Correlation	0,075	
	Sig. (2-tailed)	0,587	
	N	55	
Penghasilan	Pearson Correlation	0,245	
	Sig. (2-tailed)	0,072	
	N	55	

Sumber: Hasil Analisis

Untuk variabel pekerjaan Koefisien kontingensi sebesar 0,781 dengan *Approx Sig.* Sebesar 0,305 (lebih besar dari 0,050) menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara variabel pekerjaan responden dengan variabel tingkat partisipasi masyarakat. Nilai *chi square* hitung dari pekerjaan adalah 85.919 lebih kecil dari nilai *chi square* tabel yaitu 101,879 hal ini menunjukkan tidak adanya

720 hubungan keeratan antara pekerjaan dengan tingkat partisipasi masyarakat. Hubungan tingkat partisipasi dengan faktor internal tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 17.

Dari hasil tabel korelasi faktor internal tahun 2012 dan tingkat partisipasi diatas jika dibaca menggunakan tabel korelasi *product moment* dengan responden sebanyak 55 orang maka semua variabel memiliki korelasi yang rendah dibawah standar *r* tabel 5% (0,266) diantaranya penghasilan 0,245 faktor pendidikan: 0,075, dan faktor usia dengan nilai 0,022.

Untuk hubungan faktor internal (variabel jenis kelamin dan pekerjaan) dengan tingkat partisipasi tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 18. KORELASI *CHI SQUARE* UNTUK FAKTOR JENIS KELAMIN DAN PEKERJAAN

Variabel		chi Square value	CC	df	Asymp. Sig. (2-sided)	r tabel 5%
Jenis kelamin	Pearson Chi-Square	20.868 ^a	0,524	18	0,286	28,869
	N of Valid Cases	55				
Pekerjaan	Pearson Chi-Square	78.793 ^a	0,767	90	0,795	113,145
	N of Valid Cases	55				

Sumber: Hasil Analisis

Dari tabel 18 diatas tergambar bahwa koefisien kontingensi sebesar 0,524 dengan *Approx Sig.* Sebesar 0,286 (lebih besar dari 0,050) menunjukkan bahwa tidak adanya korelasi antara variabel jenis kelamin dengan variabel tingkat partisipasi kearah positif. Nilai *chi square* hitung dari jenis kelamin adalah 20.868 lebih kecil dari nilai *chi square* tabel yaitu 28,869 hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan keeratan yang cukup signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat partisipasi masyarakat.

Untuk variabel pekerjaan Koefisien kontingensi sebesar 0,767 dengan *Approx Sig.* Sebesar 0,795 (lebih besar dari 0,050) menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara variabel pekerjaan

responden dengan variabel tingkat partisipasi masyarakat. Nilai *chi square* hitung dari pekerjaan adalah 78.793 lebih kecil dari nilai *chi square* tabel yaitu 113,145 hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan keamatan antara pekerjaan dengan tingkat partisipasi masyarakat.

Berdasarkan analisis hubungan faktor internal dengan tingkat partisipasi masyarakat pada tahun 2011 dan 2012 diatas, faktor pendidikan, penghasilan dan jenis kelamin memiliki hubungan erat dengan tingkat partisipasi pada tahun 2011. Pendidikan memiliki hubungan erat dengan tingkat partisipasi dimana faktor pendidikan akan mempengaruhi keaktifan responden dalam berpartisipasi. Semakin tinggi latar belakang pendidikannya, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan. Faktor pendidikan dianggap penting karena dengan melalui pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap terhadap inovasi.

Selain pendidikan faktor penghasilan juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, karena besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Tingkat penghasilan yang mencukupi akan mempengaruhi waktu luang masyarakat karena mereka tidak disibukkan lagi dengan mencari tambahan penghasilan sehingga lebih aktif untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan. Dan tingkat penghasilan yang rendah akan memberikan pengaruh sebaliknya. Faktor jenis kelamin juga memberikan pengaruh terhadap tingkat partisipasi, hal ini ditunjukkan dari sebagian besar responden yang berjenis kelamin laki-laki dibandingkan perempuan, sistem pelapisan atas dasar seksualitas ini memberikan ruang kepada golongan pria dengan sejumlah hak istimewa dibandingkan golongan wanita. Dengan demikian maka kecenderungannya, kelompok pria akan lebih banyak ikut berpartisipasi. Untuk hubungan

722 tahun 2012 dari semua variabel internal tersebut diatas tidak ada yang memiliki hubungan dan pengaruh yang cukup erat/signifikan.

**HUBUNGAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
 DENGAN FAKTOR EKSTERNAL.**

**TABEL 19. HUBUNGAN TINGKAT PARTISIPASI DENGAN
 FAKTOR EKSTERNAL TAHUN 2011**

Faktor Eksternal		partisipasi	R Tabel 5 %
Peran Pemerintah	Pearson Correlation	0,433**	0,266
	Sig. (2-tailed)	0,001	
	N	55	
Peran Stakholders	Pearson Correlation	0,480**	
	Sig. (2-tailed)	0,000	
	N	55	

Sumber: Hasil Analisis

Dari hasil tabel korelasi faktor eksternal dan tingkat partisipasi diatas jika dibaca menggunakan tabel korelasi *product moment* dengan responden sebanyak 55 orang maka faktor peran *stakholders* sangat signifikan dengan tingkat partisipasi yakni 480**, diikuti dengan faktor peran pemerintah: 433**.

**TABEL 20 HUBUNGAN TINGKAT PARTISIPASI DENGAN FAKTOR EKSTERNAL
 TAHUN 2012**

Faktor Eksternal		partisipasi	R tabel 5%
Peran Pemerintah	Pearson Correlation	426**	0,266
	Sig. (2-tailed)	,001	
	N	55	
Peran Stakholders	Pearson Correlation	435**	
	Sig. (2-tailed)	,001	
	N	55	

Sumber: Hasil Analisis

Sedangkan untuk tabel korelasi faktor eksternal dan tingkat partisipasi tahun 2012 diatas jika dibaca menggunakan tabel korelasi *product moment* dengan responden sebanyak 55 orang maka faktor peran stakholders sangat signifikan dengan tingkat partisipasi yakni 0,426**, diikuti dengan faktor peran pemerintah: 0,435**.

Hubungan yang sangat kuat anantara peran stakholder dan pemerintah terhadap kegiatan musrenbang ini menunjukkan pentingnya pemerintah dan *stakholder* dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah dapat berperan melalui peningkatan informasi, keterbukaan perencanaan, pembinaan masyarakat dan melaksanakan program pembangunan secara transparan dan akuntabel. Dan untuk *stakholder* dapat menjadi penengah antara pemerintah dan masyarakat guna membantu mensosialisasikan rencana pembangunan serta mengawal agenda pembangunan.

KESIMPULAN

Tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Sanana Pada Tahun 2011 dan 2012 termasuk dalam kategori tingkat *informing* (Tangga ketiga dari delapan Tangga Arnstein). tingkat *Informing* ini termasuk dalam derajat tokenisme/penghargaan atau *Degree of Tokenism*, yaitu suatu tingkat partisipasi dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pada musrenbang tahun 2011 dan 2012, faktor internal diantaranya jenis kelamin masih didominasi oleh laki-laki, berusia matang diatas 50 tahun, tingkat pendidikan yang masih rendah kebanyakan partisan berpendidikan SMA/Sederajat, memiliki pekerjaan yang mayoritas sebagai petani dan nelayan, serta berpenghasilan rendah dibawah Rp.500.000. Faktor eksternal peran

724 pemerintah dan *stakeholders* sudah cukup baik dalam memberikan informasi dan pembinaan kepada masyarakat khususnya responden, hanya saja apa yang disampaikan masyarakat selama musrenbang sebagian besar belum terpenuhi.

Hubungan antara tingkat partisipasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, untuk faktor internal pada tahun 2011 ditemukan variabel jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan partisan memiliki hubungan yang sangat erat/signifikan. Pendidikan menunjukkan tingkat pemahaman partisan terhadap masalah dalam perencanaan pembangunan yang berpengaruh pada keaktifan berpendapat. Dan pekerjaan partisan yang sebagian besar petani dan nelayan berpengaruh pada waktu luang dalam mengikuti kegiatan musrenbang tersebut. Jenis kelamin menunjukkan adanya pelapisan sosial dalam masyarakat dimana laki-laki memiliki hak istimewa dalam pembangunan. Untuk tahun 2012 dari hasil analisis data tidak ditemukan adanya hubungan antara faktor yang mempengaruhi dengan tingkat partisipasi masyarakat. Sementara untuk hubungan faktor eksternal dengan tingkat partisipasi pada tahun 2011-2012 ditemukan variabel peran pemerintah dan peran stakeholder memiliki hubungan keeratan/signifikan dengan tingkat partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Sanana hanyalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menggugurkan kewajiban dihadapan aturan Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Substansi dari pelaksanaan musrenbang yang tujuannya adalah pemberdayaan belum terpenuhi, hal ini disebabkan karena tingkat partisipasi masyarakat yang rendah.

Untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Sanana dan Kabupaten Kepulauan Sula secara umum, pemerintah daerah harus memberikan informasi pelaksanaan musrenbang lebih dini serta memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat.

Pemerintah melalui Bappeda lebih cermat dan selektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang diusulkan dalam musrenbang sehingga kebutuhan mendesak masyarakat dapat diakomodir dalam kebijakan daerah. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tingkat partisipasi ini penulis merekomendasikan agar dikaji lebih jauh keputusan program pembangunan pemerintah daerah dan kesesuaiannya dengan usulan/saran dari masyarakat dalam kegiatan musrenbang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (eds). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001.
- Hadi, Sudarto, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
- Maleong, Lexi J, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Pelajar, 2005.
- , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010
- Kartasasmita, Ginanjar, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES. 1997.
- Slamet Y. 1993 *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Surakarta: Sebelas maret University Press.
- Moelyarto, Tjokrowinoto, *Restrukturisasi Ekonomi dan Birokrasi*, Yogyakarta: Kreasi Wacana. 1999.
- Syahrani, et.al. *Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Slamet, Margono, *Sumbang Saran Mengenai Pola, Strategi dan Pendekatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada PJP II*, Makalah Lokakarya tanggal 4-5 Juli 1995, Ciawi Bogor. 1994.
- Suciati, 2006. *"Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati"* Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro Semarang.
- Yulianti, Rina. 2000. *"Efektivitas Metode Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Limbah Perkotaan di Perumnas Mojosongo Surakarta."* Program Studi Pembangunan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sunarti. 2003. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan Secara Berkelompok*. Jurnal Tata Loka Volume 5, No. 1, Januari 2003.
- Undang-undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri No: 0008/M.PPN/01/2007 050/264A/SJ, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula No 11 Tahun 2010 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.

JURNAL

- Asariansyah, Muhammad Faisal dkk. 2010. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6.
- Damanik, Inta P. N. Dan M. E. Tahitu. 2007. *Studi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Kasus: Masyarakat Desa Layeni, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah)*. Jurnal Agroforestri Volume li Nomor 1 Maret 2007.
- Fadil, Fathurrahman. 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah*. Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal. Volume li Edisi 2, Juli-Desember 2013.
- Lubis, Asri. 2009. *Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Jurnal Tabularasa Pps Unimed Vol.6 No.2, Desember 2009.
- Simanullang, Lahsa Junianna dkk. *Pengaruh Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mp) Di Kecamatan Laguboti Toba Samosir*. Jurnal Ekonom, Vol 16, No 3, Juli 2013